

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH DESA KUALA
PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Oleh:

**RIDWAN APRI ALDINATA
165310079**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ridwan Apri Aldinata
NPM : 165310079
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Kuala Panduk
Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA.

Efi Susanti, SE., M.Acc.

Mengetahui:

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Dr. Firdaus AR, M.Si., Ak., CA.



Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan. Pekanbaru.Riau. Indonesia - 28284

Telp +62761 674674 Fax +62761 674834 Email :fekon@uir.ac.id Web : www.c.uir.id

NOTULENSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Ridwan Apri Aldinata
NPM : 165310079
Hari/Tanggal : Kamis, 03 Desember 2020
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Sidang dibuka **Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA** dan mempersilahkan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, selama sepuluh menit dan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab.

No	Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dr. Zulhelmy, SE, MSi, Ak., CA. 1 Perbaiki Abstrak 2 Perbaiki Pedoman dari Ikatan Akuntan Indonesia- Kementerian Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP 2015) Ke Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Diabstrak Setiap Pembahasan	
2	Haugesti Diana, SE., M.AK 1 Perbaiki Abstrak 2 Perbaiki Penulisan	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Diabstrak Bab 1,2,3,4	

Disetujui

Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA
Pembimbing

Disetujui

Efi Susanti, SE., M.Acc
Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RIDWAN APRI ALDINATA
NPM : 165310079
FAKULTAS : EKONOMI
JURUSAN : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN
SPONSOR : **Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA.**
CO SPONSOR : **Efi Susanti, SE., M.Acc.**
Dengan perincian bimbingan skripsi sebagai berikut:

Tanggal	Catatan		Berita Acara	Paraf Sponsor
	Sponsor	Co Sponsor		
06/06/2020	X	-	- Latar Belakang Masalah	
11/06/2020	X	-	- Latar Belakang Masalah -	
15/06/2020	X	-	- Latar Belakang Masalah	
07/07/2020	X	-	- Latar Belakang Masalah	
11/07/2020	X	-	- ACC Proposal - Lanjut Ke PB 2	
04/08/2020	-	X	- Perbaiki Teknis Penulisan, Latar Belakang Masalah - Perbaiki Bab II Telaah Pustaka - Perbaiki Bab III Jenis dan Sumber Data	
14/08/2020	-	X	- Perbaiki Teknis Penulisan Bab I - Perbaiki Manfaat Penelitian Bab I - Perbaiki Teknis Penulisan Bab II	

29/08/2020	-	X	- ACC Proposal PB 2	
25/10/2020	X	-	- Perbaiki Kesimpulan dan Saran	
26/10/2020	X	-	- ACC Seminar Hasil - Lanjut Ke PB	
02/11/2020	-	X	- Perbaiki Abstrak Sesuai Dengan Metode Penelitian Bab III	
14/11/2020	-	X	- Perbaiki Teknik Penulisan - Perbaiki Pembahasan Bab IV	
28/11/2020	-	X	- ACC Seminar Hasil	

Pekanbaru, 27 Desember 2020

Wakil Dekan I



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 1700/KPTS/FE-UIR/2020, Tanggal 01 Desember 2020, Maka pada Hari Kamis 03 Desember 2020 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2020/2021

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama | : Ridwan Apri Aldinata |
| 2. NPM | : 165310079 |
| 3. Program Studi | : Akuntansi S1 |
| 4. Judul skripsi | : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan. |
| 5. Tanggal ujian | : 03 Desember 2020 |
| 6. Waktu ujian | : 60 menit. |
| 7. Tempat ujian | : Ruang sidang meja hijau Fekon UIR |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : Lulus (B-) 64,12 |
| 9. Keterangan lain | : Aman dan lancar. |

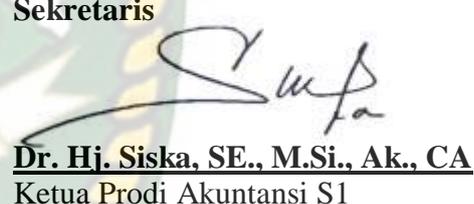
PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
Ketua Prodi Akuntansi S1

Dosen penguji :

1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Efi Susanti, SE., M.Acc
3. Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA
4. Haugesti Diana, SE., M.Ak



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Notulen

1. Yolanda Pratami, SE., M.Ak



(.....)

Pekanbaru, 03 Desember 2020

Mengetahui
Dekan,



Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1700 / Kpts/FE-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/oral komprehensif sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

N A M A : Ridwan Apri Aldinata
N P M : 165310079
Program Studi : Akuntansi S.1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.

2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Efi Susanti, SE., M.Acc	Assisten Ahli, C/b	Sistematika	Sekretaris
3	Dr. Zulhelmy, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor Kepala, D/a	Methodologi	Anggota
4	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Asisten Ahli C/b	Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Yolanda Pratami, SE., M.Ak	Non Fungsional C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Desember 2020
Dekan

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada :

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

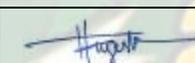
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Ridwan Apri Aldinata
NPM : 165310079
Jurusan : Akuntansi / S1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
Hari/Tanggal : Kamis 03 Desember 2020
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA		
2	Efi Susanti, SE., M.Acc		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Zulhelmy, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA		
2	Haugesti Diana, SE., M.Ak		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai 65)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 03 Desember 2020
Ketua Prodi


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

*) Coret yang tidak perlu

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ridwan Apri Aldinata
NPM : 165310079
Judul Proposal : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan.
Pembimbing : 1. Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA
2. Efi Susanti, SE., M.Acc
Hari/Tanggal Seminar : Jum'at 25 September 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

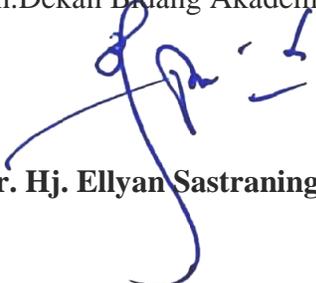
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Azwirman, SE., M.Acc., CPA	Ketua	1. 
2.	Efi Susanti, SE., M.Acc	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA	Anggota	3. 
4.	Muhammad Fahdi, SE., M.Ak	Anggota	4. 
5.	Haugesti Diana, SE., M.Ak	Anggota	5. 

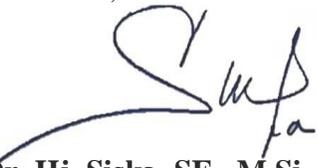
*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 25 September 2020
Sekretaris,


Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA.
Di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Untuk memperlancar proses penyusunan skripsi mahasiswa Prodi Akuntansi S1, maka dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi :

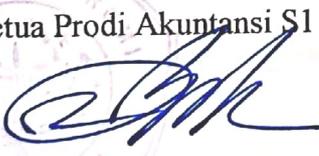
No	Nama Dosen	Keterangan
1	Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA.	Pembimbing I
2	Efi Susanti, SE., M.Acc	Pembimbing II

Mahasiswa yang akan dibimbing adalah:

No	Nama Mahasiswa	NPM	Judul Proposal/ Skripsi
1	Ridwan Apri Aldinata	165310079	Analisis penerapan akuntansi pemerintahan desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Kami mohon kepada Bapak/Ibu agar dapat membimbing proposal/skripsi mahasiswa tersebut sampai selesai. Adapun SK Dosen Pembimbing Skripsi akan dikirim kemudian setelah selesai diproses oleh bagian administrasi prodi. Atas bantuan bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 April 2020
Ketua Prodi Akuntansi S1


Dra. Eny Wahyuningsih, MSi., Ak., CA.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email : fekon@uir.ac.id Website : www.ac.uir.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : RIDWAN APRI ALDINATA
NPM : 165310079
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 30 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Desember 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintah Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, 27 Desember 2020

Yang memberikan pernyataan,



Ridwan Apri Aldinata

NPM: 165310079

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Jenis dan sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian merupakan data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini berupa *soft copy* berupa Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa. Sedangkan data skunder berupa data pendukung yang diperoleh dari dokumen, buku, serta hasil penelitian lainnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif karena penelitian ini berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang didukung dengan teori yang relevan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Kuala Panduk Kecamatan Taluk Meranti Kabupaten Pelalawan belum sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kata Kunci: Akuntansi, Siklus Akuntansi, Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

ABSTRACT

The aim of the study was to determine the suitability of the accounting application at the Village of Kuala Panduk Teluk Meranti District Pelalawan Regency Government with Generally Accepted Accounting Principles.

Primary data in this study is a soft copies were General Cash Books, Village Bank Books, Tax Assistant Cash Books, Activity Subsidiary Cash Books, Village Revenue and Expenditure Budget Implementation Reports, Village Property Reports. While secondary data is in the form of supporting data obtained from documents, books, and other research results. This study uses a qualitative analysis method because this researcher's interpretation of a phenomenon, then this research is descriptive supported by relevant theories.

The results of this study indicate that the application of financial accounting in the village of Kuala Panduk Taluk Meranti District Pelalawan Regency is not in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

Keywords: *Accounting, Accounting Cycle, Village Financial Management and Recording System.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

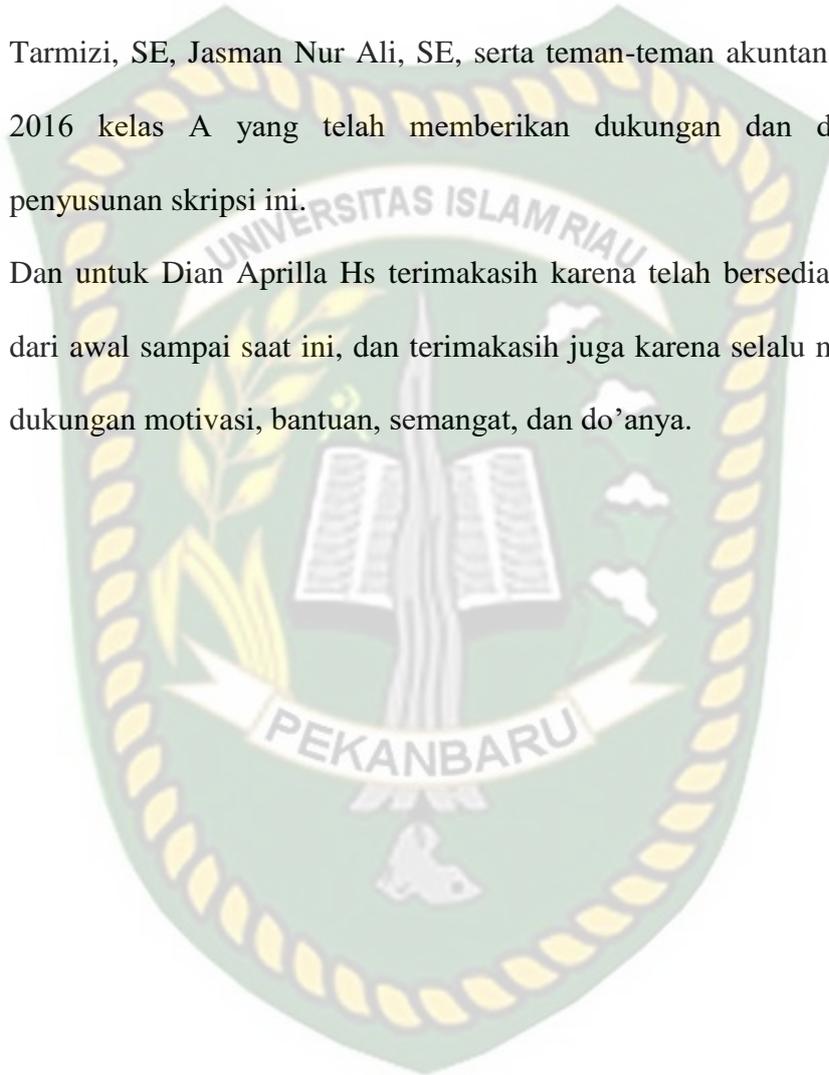
Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dan ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang di sekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan, maka pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasaa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H.Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA sebagai ketua jurusan Program Studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Azwirman, SE. M.Acc., CPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran bersedia membimbing penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Ibuk Efi Susanti,SE. M.Acc selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan mendidik Penulis dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan.
7. Bapak/Ibu Kepala Tata Usaha dan segenap pegawainya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan penulis dalam administrasi.
8. Teristimewa Kepada Kedua Orang Tua atas segala curahan kasih sayang, perhatian, dukungan dan pengarahan serta do'a yang selalu di panjatkan kepada-Nya. Sehingga selama ini saya bisa menyelesaikan skripsi dengan mudah dan lancar.
9. Terimakasih Kepada Bapak Tomjon sebagai Kepala Desa Kuala Panduk dan Ibuk Arika SE sebagai Kaur Keuangan yang telah bersedia memberikan kemudahan penulis dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
10. Terimakasih Kepada Abang Abu dan keluarga yang telah membantu penulis dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat Pedjuang Mahar yaitu Samsurizal Putra Tama, SE, Gustri Harto Pambudi, SE, Riski Kurnia Ilahi, SE, Riski Hidayat, SE,

Muhammad Fendi, SE, Boyman Zuliardi, SE, Aprima Saputra, SE, yang telah memberikan bantuan selama ini.

12. Untuk sahabat seperjuangan saya Ricky Iskandar Dinata, SE, Ahmad Tarmizi, SE, Jasman Nur Ali, SE, serta teman-teman akuntansi angkatan 2016 kelas A yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan skripsi ini.
13. Dan untuk Dian Aprilla Hs terimakasih karena telah bersedia menemani dari awal sampai saat ini, dan terimakasih juga karena selalu memberikan dukungan motivasi, bantuan, semangat, dan do'anya.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
NOTULENSI SEMINAR HASIL.....	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	
SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI	
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL	
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi	10
2.1.1.1 Tujuan Akuntansi	11
2.1.1.2 Siklus Akuntansi.....	12
2.1.1.3 Laporan Keuangan.....	15

2.1.2	Definisi Akuntansi Keuangan Desa.....	15
2.1.2.1	Definisi Desa	15
2.1.2.2	Pengguna Akuntansi Keuangan Desa.....	19
2.1.2.3	Siklus Akuntansi Desa.....	20
2.2	Hipotesis	22
BAB III. METODE PENELITIAN		23
3.1	Desain Penelitian	23
3.2	Objek Penelitian	23
3.3	Jenis dan Sumber Data	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data	23
3.5	Teknik Analisis Data	24
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	25
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	29
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....		48
5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Buku Kas Umum-Tunai

Tabel 4.2 Buku Kas Pembantu Pajak

Tabel 4.3 Buku Bank Desa

Tabel 4.4 Buku Besar Kas di Bendahara Desa

Tabel 4.5 Buku Besa Alokasi Dana Desa

Tabel 4.6 Buku Besa Dana Desa

Tabel 4.7 Buku Besar Belanja Pegawai

Tabel 4.8 Buku Besar Belanja Barang dan Jasa

Tabel 4.9 Neraca Saldo

Tabel 4.10 Neraca Lajur

Tabel 4.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDesa

Tabel 4.12 Laporan Kekayaan Milik Desa

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Panduk Kecamatan
Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik desa

Lampiran 2 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran 3 Buku Kas Umum

Lampiran 4 Buku Bank Desa

Lampiran 5 Buku Kas Pembantu Pajak

Lampiran 6 Buku Kas Pembantu Kegiatan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainya yang memadai agar pelaksanaanya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari faktor keuangan yang tidak jauh dari hal pendanaan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam hal pendanaan operasional pemerintahan desa Kuala Panduk bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

kabupaten/kota, salah satu operasional pengelolaan dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Kabupaten/Kota dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dari alokasi khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa hal ini tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah : (1) Masyarakat desa, (2) Perangkat desa, (3) Pemerintahan desa, (4) Pemerintah pusat.

Menurut IAI-KASP 2015 siklus akuntansi terdiri dari empat tahap yaitu : Tahap pertama tahap pencatatan, tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap kedua tahap penggolongan, tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai

ke dalam kelompok debit dan kredit. Tahap ketiga tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dalam buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus seimbang atau sama. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari kesalahan pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. Tahap ke empat tahap pelaporan, tahap ini tahap terakhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Desa Kuala Panduk sebagai salah satu dari 9 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah Desa Kuala Panduk menurut BPS Kabupaten Pelalawan (2018) adalah 234,00 km² atau 23.400 hektar (Ha). Pemetaan partisipatif tahun 2019 di Desa Kuala Panduk menghasilkan peta menggunakan batas-batas indikatif yang ditunjukkan masyarakat dengan luas wilayah sebesar 25.193,33 Ha yang terdiri dari wilayah daratan seluas 24.932,96 Ha serta wilayah badan air 260,37 Ha.

Adapun untuk data jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Desa Kuala Panduk tahun 2019 mempunyai kecenderungan bertambah jika dibandingkan dengan tahun 2016, hanya saja untuk tahun 2018 jumlah KK menurun meski sangat

sedikit. Pada tahun 2016 jumlah KK sebanyak 523, tahun 2017 jumlah KK 528, untuk tahun 2018 KK berjumlah 533, dan pada tahun berikutnya 2019 jumlah KK sebanyak 531 atau sekitar 1.560 jiwa.

Dasar pencatatan akuntansi Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Berbasis kas. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima direkening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan.

Sejak tahun 2016 Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti telah menggunakan sistem keuangan desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berguna untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Proses akuntansi yang dilakukan Desa Kuala Panduk berawal dari bukti-bukti transaksi kemudian melakukan pembukuan yang sesuai yaitu sebagai berikut : Buku Kas Umum (lampiran 3) digunakan untuk melakukan pencatatan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Bank Desa (lampiran 4) digunakan untuk membantu buku kas umum dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Buku Kas Pembantu Pajak (lampiran 5) digunakan untuk membantu buku kas umum mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pajak. Selanjutnya Buku Kas Pembantu Kegiatan (lampiran 6) digunakan untuk mencatat semua kegiatan desa baik berupa

penerimaan (dari bendahara, swadaya masyarakat) dan pengeluaran (belanja barang dan jasa, belanja modal), serta saldo kas.

Selanjutnya setelah dari tahapan pencatatan kedalam buku-buku yang sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dibuat, Desa Kuala Panduk berkewajiban membuat tahap pelaporan berdasarkan rekap tahunan untuk penyusunan laporan keuangan desa yaitu : Pertama, membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (lampiran 2) dalam laporan ini berisi pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu satu tahun, setelah anggaran disahkan kemudian dilaksanakan dan dibukukan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa digunakan untuk pendapatan yang dicatat berisikan informasi pendapatan transfer dan pendapatan asli dari desa. Kemudian belanja yang memiliki empat bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan mesyarakat. Selanjutnya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi selama satu periode sehingga akan diketahui sisa lebih/kurang perhitungan anggaran tahun tertentu.

Kedua, membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih desa anggaran tahun tertentu yang berisikan tentang informasi aset lancar seperti kas dan bank, persediaan, piutang, penyertaan modal pemerintah desa, kemudian aset tetap yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, diperoleh atau dibeli dari APBDesa atau perolehan lainnya yang sah. Aset tetap ini terdiri dari gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan instalasi, tanah kemudian aset tidak lancar, kewajiban

serta ekuitas. Pencatatan yang dilakukan Desa Kuala Panduk belum memposting ke dalam Buku Besar serta tidak melakukan pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo dan kertas kerja.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) pernyataan modal desa tahun 2019 bersaldo Rp 0, padahal dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBDesa (lampiran 2) tahun 2019 pernyataan modal desa sebesar Rp 292.000.000.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) tahun 2018 terdapat asset tetap sebesar Rp 2.823.198.900. Ditahun 2019 belanja modal dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebesar Rp 1.377.393.000, disaldo Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019 saldo asset tetap sebesar Rp 15.937.500. Desa Kuala Panduk tidak melakukan pengakumulasian asset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa periode tahun 2018 ke periode tahun 2019 sebagai penambahan dari pengeluaran modal periode tahun berjalan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis masalah pengelolaan dana desa dengan melakukan penelitian dalam bentuk proposal berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat bagi penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengalaman, pemahaman mengenai khususnya dalam bidang akuntansi secara umum, dan bidang akuntansi keuangan daerah, dimana bagi penulis bisa melihat secara langsung praktek akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dikantor Desa Kuala Panduk.
- b. Bagi Kantor Desa Kuala Panduk, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sarana masukan yang dapat dijadikan perbaikan-perbaikan dalam merencanakan keuangan daerah dan dapat mengetahui manfaat dari penerapan akuntansi keuangan daerah yang baik serta menjadi contoh bagi desa-desa lainnya.
- c. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi perbandingan atau acuan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian sejenis bagi peneliti dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagi kedalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab pertama dari proposal ini menguraikan secara singkat mengenai isi proposal yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan masalah dan kerangka pemikiran.

BAB III :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjelaskan mengenai gambaran umum desa, hasil penelitian dan pembahasan Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting serta diharapkan berguna bagi kantor desa dan penulis.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan, pemerintahan dan jenis organisasi lainnya. Adanya kriteria bahwa informasi yang dihasilkan oleh akuntansi adalah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi adalah keputusan yang menyangkut ilmu ekonomi, tidak terbatas pada keputusan yang berkaitan dengan dana yang dimiliki oleh si pengambil keputusan. Pengertian akuntansi menurut Sasongko (2016) akuntansi adalah proses/aktivitas yang menganalisis, mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasikan informasi keuangan untuk kepentingan para penggunanya.

Adapun menurut T. Harrison, dkk (2011) pengertian akuntansi adalah sebuah system yang mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi menjadi suatu laporan yang berguna untuk membuat keputusan dalam bisnis.

Menurut Rudianto (2010) akuntansi adalah Sebuah informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Warren, dkk (2014) mendefinisikan akuntansi adalah system yang berisikan informasi

keuangan mengenai aktivitas dan keadaan perusahaan yang berguna bagi para pemangku kepentingan.

Menurut Harahap (2011) menyatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang keadaan keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu periode tertentu.

Sedangkan menurut Dedi, dkk (2012) akuntansi yaitu tahapan dari mulai mengenali, mengukur, dan memberikan informasi ekonomi yang berguna untuk menjadi pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan agar keputusan yang diambil tersebut tepat.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan dengan cara mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.1.1 Tujuan Akuntansi

Secara umum, tujuan akuntansi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan.

Menurut Menurut Warren, dkk (2017) tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat dalam bisnis. Sebagai contoh, laporan keuangan mengenai operasi dan kondisi bisnis

bermanfaat bagi bank dan kreditor lainnya dalam memutuskan untuk memberi pinjaman atau tidak.

Sedangkan menurut Irma (2017) tujuan dari akuntansi adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- c. Memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi penting lain mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti aktivitas pembiayaan dan investasi.
- e. Mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi tentang sumberdaya organisasi yang baik pengukurannya, serta untuk pengambilan keputusan. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah untuk membuat kebijakan perusahaan agar memberikan gambaran ekonomis mengenai sumber-sumber daya yang tersedia bagi perusahaan.

2.1.1.2 Siklus Akuntansi

Definisi siklus akuntansi menurut Martini, dkk (2012) yaitu seluruh kegiatan yang digunakan untuk mengelola data keuangan yang dilakukan oleh

suatu organisasi agar menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Hery (2016:13) menyatakan bahwa siklus dasar akuntansi meliputi bukti-bukti transaksi keuangan, penjurnalan, postingan didalam buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup dan pembuat laporan keuangan.

Sedangkan siklus akuntansi menurut Pura (2013) adalah sebagai berikut:

Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi di akhiri dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi periode berikutnya sampai penutupan pembukuan disebut dengan siklus akuntansi. Menganalisis transaksi perusahaan dan menyiapkan bukti pembukuan (1), kemudian setelah menganalisis dicatat ke akun buku jurnal (2), selanjutnya transaksi diposting ke akun buku besar (3), setelah memposting ke buku besar lanjut menyusun ke neraca saldo (4), untuk melihat saldo yang sebenarnya maka dibuat jurnal penyesuaian (5), kemudian menyusun neraca lajur (6), setelah neraca lajur yaitu menyusun laporan keuangan (7), dan yang terakhir yaitu membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup kemudian membuat jurnal pembalik untuk menyesuaikan jurnal penyesuaian agar tidak terjadi pencatatan dua kali maka dilakukan jurnal pembalik (8).

Menurut Mursyidi (2010) bahwa tahapan dalam proses akuntansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan (*Recording*)

Dalam tahap ini transaksi keuangan dicatat secara rinci dan sistematis didalam buku yang biasanya disebut berupa jurnal dalam periode tertentu.

2. Pengelompokan (*Classification*)

Pada tahap pengelompokan bahwa seluruh transaksi dicatat dan dikelompokan sesuai dengan akun masing-masing, yaitu kelompok akun (aset), akun kewajiban (liabilitas), akun ekuitas (equity), akun pendapatan (revenue), dan akun beban (expense).

3. Pengikhtisaran (*Summarizing*)

Dalam tahap pengikhtisaran dimana akun yang disajikan diposisikan disisi debit dan kredit seperti dalam bentuk saldo. Setelah semua transaksi sudah dicatat lalu dikelompokan dalam daftar tersendiri dalam bentuk neraca saldo.

4. Pelaporan (*Reporting*)

Pada tahap ini seluruh aktivitas transaksi disusun dan dilaporkan secara detail dan rinci agar mudah dapat untuk dipahami. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (income sttment), laporan neraca (balance sheet), laporan arus kas (cash flow statment), dan catatan atas laporan keuangan.

5. Penafsiran (*Analizing*)

Pada tahap ini adalah dimana lanjutan dari proses akuntansi secara teknis agar dapat mengetahui kinerja dan posisi keuangan dan perubahanya untuk organisasi.

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012) laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan suatu perusahaan dan mengetahui lebih jauh informasi yang dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

2.1.2 Definisi Akuntansi Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.”

Menurut IAI-KASP tahun 2015 Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

2.1.2.1 Definisi Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah sebagai berikut “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Replubik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.

Pengertian desa menurut Nurcholis (2011) adalah sebagai berikut:

Desa atau dengan nama aslinya yang disingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu ‘badan hukum’ dan adapula ‘badan pemerintahan’, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya.

Adapun menurut pengertian desa menurut Nurcholis (2011) adalah:

Desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hokum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hokum adat).

Sedangkan menurut Wijaya (2018) desa dapat dikategorikan menjadi tiga macam berdasarkan tipologinya yaitu:

1. Desa tertinggal atau desa sangat tertinggal memperhatikan factor-faktor yang berhubungan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan serta akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang lebih memperhatikan factor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju atau mandiri sangat memperhatikan factor-faktor sarana prasarana yang berdampak pada kegiatan ekonomi dan investasi desa, prakarsa desa membuka lapangan pekerjaan, teknologi yang tepat guna, dan investasi melalui Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penata Desa tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- e. Meningkatkan daya saing Desa

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa segala penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kewajiban Pemerintahan Desa.

Akuntansi Desa menurut Wijaya (2018) menjelaskan bahwa yang berperan untuk mengelola desa diberikan kuasa tertinggi kepada Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa dengan jabatan selama 6 tahun.

Tugas Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal (26) tentang desa adalah sebagai berikut:

“Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Jadi yang mengatur pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari ; Sekretariat Desa yang dipimpin

oleh Sekretaris Desa dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Pelaksanaan Kewilayahan merupakan unsur pembantu dari kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan dan Pelaksanaan Teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional.

2.1.2.2 Pengguna Akuntansi Keuangan Desa

Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi diantaranya adalah (IAI-KASP, 2015):

1. Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekertaris desa, bendahara, dan kepala urusan/kepala seksi.
2. Badan permusyawaratan desa (BPD). Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
3. Pemerintah. Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
4. Pihak lainnya. Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

2.1.2.3 Siklus Akuntansi Desa

Menurut IAI-KASP tahun 2015 siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi.

1. Tahap pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

2. Tahap penggolongan

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap pengikhtisaran

Setelah seluruh transaksi dicatat pada Buku Kas Umum dan Buku Besar, tahapan berikutnya adalah tahapan pengikhtisaran, pada tahapan ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dari buku besar dan neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk menyakinkan bahwa proses yang telah dilakukan pencatatannya dengan benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Kertas kerja atau neraca lajur dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan. Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Angka

yang disajikan pada Neraca Lajur diambil dari Neraca Saldo seluruh Buku Besar dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut.

4. Tahap pelaporan

Tahap ini tahap terakhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Tahap-tahap siklus akuntansi menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu :

Tahapan pertama, membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.

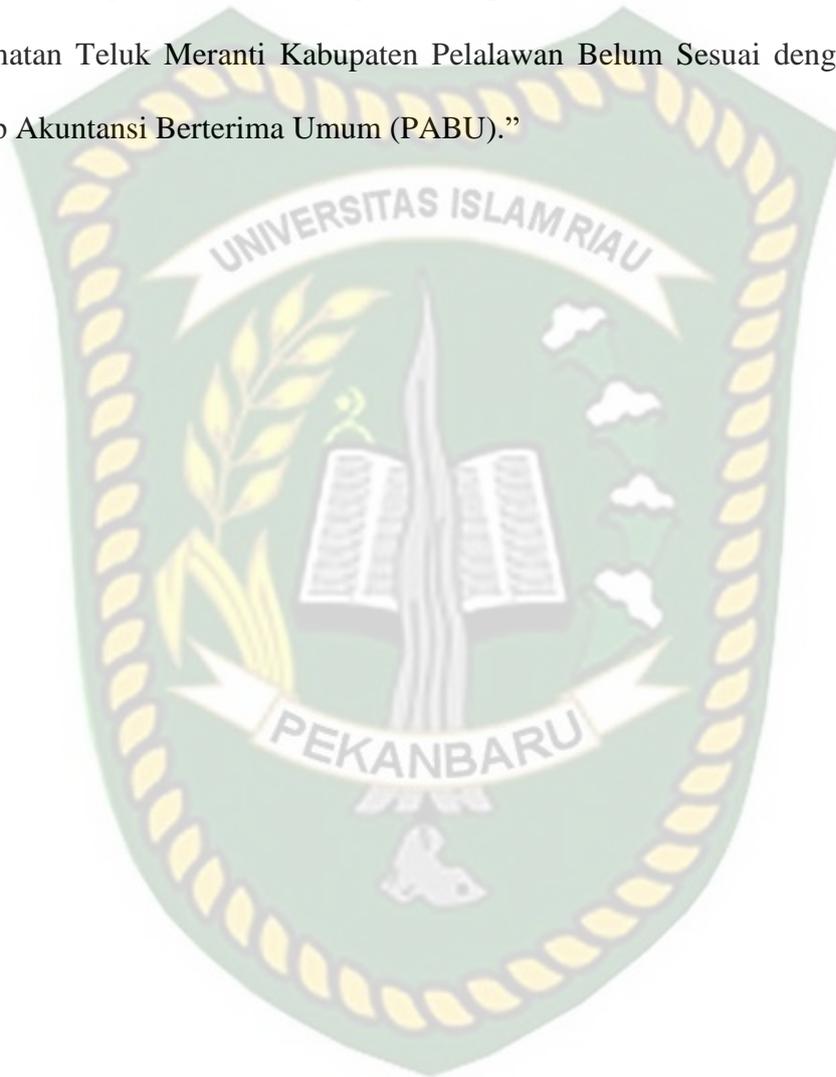
Tahapan kedua, transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai dengan bukti-bukti berupa nota maupun kuitansi.

Tahapan ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan neraca kas.

Tahapan terakhir, pembuatan laporan realisasi anggaran (LRA). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa berupa laporan realisasi anggaran (LRA).

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka maka dapat diajukan sebagai berikut “Diduga Penerapan Akuntansi Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Belum Sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).”



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena , kemudian penelitian ini bersifat deskripsi yang didukung dengan teori yang relevan.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan yang berlokasi di Jl. Lintas Bono.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kantor Desa Kuala Panduk yang diantaranya yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kekayaan Milik Desa, Buku Pembantu Kegiatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan dua teknik, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data secara langsung atau dialog. Yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah berkompeten dibidangnya dan relevan dengan pokok bahasan penelitian yakni analisis penerapan akuntansi pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Dokumen yang perlu di analisis berupa laporan keuangan Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas untuk kemudian akan diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Kuala Panduk

Nama Kuala Panduk diambil dari posisi Desa yang terletak di pertemuan aliran Sungai Panduk dengan Sungai Kampar atau kuala. Sungai Panduk sendiri dinamakan demikian karena ditemuinya hewan pelanduk putih di Sungai tersebut. Pada awalnya, wilayah Desa Kuala Panduk merupakan bagian dari wilayah salah satu perbatinan dari Perbatinan Kuang Oso Tiga Puluah, yaitu Batin Panduk. Di masa Kerajaan Pelalawan dibawah pemerintahan Sultan Jafar (1866-1872), Batin Panduk dipecah menjadi Batin Panduk dan Penghulu Setia Diraja Panduk, serta kemudian menyusul dibentuk Kepenghuluan Kuala Panduk (Marzali, 2009). Sumber lainnya (Effendy, dkk., 2008) menyatakan bahwa Kuala Panduk merupakan Bandar Panduk yaitu salah satu pelabuhan perdagangan penting di kuala Sungai Panduk yang dikembangkan pada abad 17 ketika Kerajaan Pelalawan masih menjadi Kerajaan Pekantua Kampar dibawah kepemimpinan Maharaja Lela I (1630-1650). Sebelum tahun 1928, wilayah pemukiman ini telah menjadi sebuah kampung yang dipimpin oleh Batin Taul. Pada tahun 1928, datang penduduk Pangkalan Panduk sejumlah 45 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak 135 jiwa yang mulai bermukim di wilayah ini. Barulah pada tahun 1930, Kuala Panduk dipimpin Tengku Said Umar⁸ hingga tahun 1955 sebagai Penghulu Kuala Panduk. Pada tahun 1939 datang lagi 100 KK yang berjumlah 325 jiwa yang juga bermukim di wilayah desa ini. Sehingga dari kedatangan para pemukim

pada tahun-tahun tersebut, jumlah penduduk menjadi 460 jiwa yang terdiri dari 145 KK. Mereka membuka dan menggarap tanah yang ada di sekitar Kuala Sungai Panduk. Selepas kepemimpinan Tengku Said Umar di tahun 1955, Kuala Panduk dipimpin oleh Tengku Said Mansyur. Kepimpinan Tengku said mansyur hanya berlangsung selama 9 Bulan dikarenakan beliau diangkat menjadi Kepala Penjara Pelalawan.

Kepemimpinan pemerintahan di Kuala Panduk kemudian dijabat oleh H. Abdul Rahman yang mulai menjabat dari tahun 1956 hingga tahun 1979. Pada saat itu Kuala Panduk menjadi bagian dari Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Bengkalis. H. Abdul Rahman menjabat hingga sekitar tahun 1979. Dengan adanya Undang-undang no, 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Kampung Kuala Panduk berubah menjadi Desa Kuala Panduk. Adapun Kepala Desa Kuala Panduk pertama dijabat H.Umar.A yang ditunjuk dan dilantik oleh Bupati. H.Umar.A menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Panduk hingga tahun 1994.

Sejak tahun 1994 juga terjadi Pemilihan Kepala Desa yang pertama oleh masyarakat di Desa Kuala Panduk. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kuala Panduk yang pertama dan terpilih Bapak Amirudin Ismail yang menjabat sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005 Pemilihan Kepala Desa kembali diselenggarakan dan terpilih Tengku Jakarudin. Tetapi hasil pemilihan ini diputuskan tidak sah sehingga Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, urung melantik Kepala Desa hasil pemilihan tersebut. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Kuala Panduk, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Pemerintah Kecamatan Teluk Meranti menunjuk Abu Samma (Sekdes) sebagai Pelaksana

Jabatan (PJ) Kepala Desa Kuala Panduk sampai dengan tahun 2009. Pilkades Desa Kuala Panduk kembali diselenggarakan pada tahun 2009 dan pada Pilkades itu terpilih H. Basir G. yang menjabat hingga tanggal 10 Februari 2015. Agar kepemimpinan Desa Kuala Panduk tidak mengalami kekosongan maka di tahun 2016 juga diselenggarakan Pilkades. Hasil Pilkades di Tahun 2015 ini, menghasilkan pilihan masyarakat untuk memimpin Desa Kuala Panduk dimana Bapak Tomjon terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2015 – 2021. Pelantikan Kepala Desa Panduk oleh Bupati Pelalawan, H. M. Harris pada tanggal 30 Juli 2015.

Karena luas wilayah dan jangkauan pelayanan terhadap warga, maka Wilayah Desa Kuala Panduk dipecah untuk pemekaran menjadi Desa Kuala Panduk pada 16 Januari 2001. Meskipun telah terjadi pemecahan wilayah, Desa Kuala Panduk kini semakin berkembang.

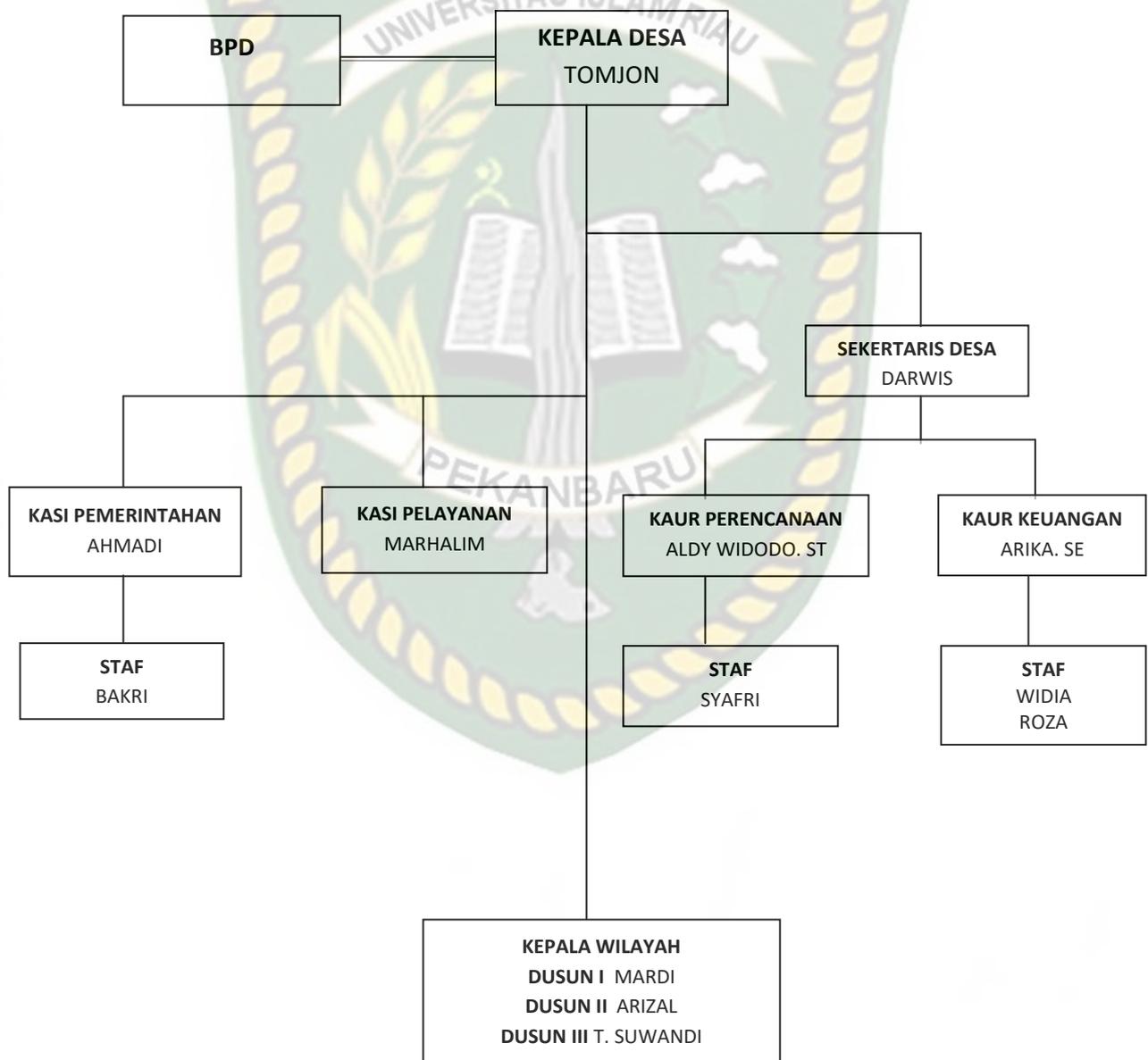
4.2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuala Panduk

4.3.1 Gambar 4.1

4.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

4.5.1 PEMERINTAH DESA KUALA PANDUK

4.6.1 KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan masalah yang dikemukakan dalam bab I dan pedoman pada teori yang relevan pada bab II, oleh karena itu, penulis akan menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

4.7.1 Dasar Pencatatan

Dasar pencatatan yang digunakan Desa Kuala Panduk untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum adalah dengan menggunakan sistem pencatatan Single Entry, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Metode single entry hanya berupa transaksi yang mempengaruhi akun kas. Transaksi yang menimbulkan bertambahnya kas akan dicatat pada kolom penerimaan dan berkurangnya kas akan dicatat pada kolom pengeluaran. Adapun dasar pengakuan pada transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang diterapkan Desa Kuala Panduk yaitu dengan menggunakan Cash Basis, dimana transaksi dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat naik atau turunnya kas atau pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi dimana uang sudah benar-benar sudah diterima ataupun dikeluarkan. Dengan demikian transaksi tersebut tidak akan dicatat apabila belum menimbulkan perubahan terhadap kas.

4.8.1 Siklus Akuntansi

1. Tahap Pencatatan

Desa Kuala Panduk melakukan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai pada Buku Kas Umum (Lampiran 3) disertai bukti

transaksi berupa kwitansi dan nota. Selain itu desa menyediakan Buku Bank Desa (Lampiran 4) untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan, terkait penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak akan dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 5). Desa tersebut juga memiliki Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6). Dibawah ini merupakan pencatatan transaksi yang dibuat oleh Desa Kuala Panduk.

a. Buku Kas Umum

Pada Desa Kuala Panduk semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, setiap penerimaan dicatat pada kolom penerimaan, begitu pula sebaliknya setiap pengeluaran dicatat pada kolom pengeluaran. Dibawah ini merupakan beberapa contoh transaksi dalam Buku Kas Umum pada Desa Kuala Panduk.

- 28 Mei 2019 Bendahara Desa Melakukan Pengambilan Tunai di Bank sebesar Rp 348.413.000
- 28 Mei 2019 Pembayaran Tunjangan Aparatur Desa untuk bulan Januari sampai Mei sebesar Rp 20.000.000
- 28 Mei 2019 Pembayaran Tunjangan BPD Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai Mei sebesar Rp 79.750.000
- 28 Mei 2019 Pembayaran Insentif RT/RW Desa Kuala Panduk bulan Januari sampai Mei sebesar Rp 15.500.000
- 28 Mei 2019 Pembayaran Honorarium PKPKD, PPKD, dan Staf kantor Desa bulan Januari sampai Mei Rp 30.000.000
- 28 Mei 2019 Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan sebesar Rp 8.250.000

Tabel 4.1
Buku Kas Umum-Tunai
Desa Kuala Panduk
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	28/05/2019		Kas dibendahara	348.413.000	
2.	28/05/2019		Pembayaran Tunjangan Aparatur Desa untuk bulan Januari sampai Mei		20.000.000
3.	28/05/2019		Pembayaran Tunjangan BPD Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai Mei		79.750.000
4.	28/05/2019		Pembayaran Insentif RT/RW Desa Kuala Panduk bulan Januari sampai Mei		15.500.000
5.	28/05/2019		Pembayaran Honorarium PKPKD, PPKD, dan Staf kantor Desa bulan Januari sampai Mei		30.000.000
6.	28/05/2019		Pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan		8.250.000

Sumber : Buku kas Umum-Tunai Kuala Panduk

Berdasarkan Tabel 4.1 Buku Kas Umum yang digunakan Desa Kuala Panduk telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

b. Buku Bank

Selanjutnya Desa Kuala Panduk membuat Buku Bank Desa untuk merekap uang masuk dan penarikan keuangan. Berikut ini merupakan beberapa contoh transaksi dalam Buku Bank Desa yang dibuat oleh Desa Kuala Panduk.

27 Mei 2019 Desa Kuala Panduk Menerima Alokasi Dana Desa 60% Tahap I sebesar Rp 573.245.400

27 Mei 2019 Desa Kuala Panduk menerima Dana Desa (APBN) 20%

sebesar Rp 196.048.200

28 Mei 2019 Desa Kuala Panduk melakukan Penarikan DD Tunai tahap I sebesar Rp 194.350.500

28 Mei 2019 Desa Kuala Panduk melakukan Penarikan ADD Tunai Tahap I sebesar Rp 348.413.000

Tabel 4.2
Buku Bank Desa
Desa Kuala Panduk
Tahun Anggaran 2019

No	Tanggal	Uraian Transaksi	No Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/05/2019	Alokasi Dana Desa Tahap I		573.245.400					573.245.400
2	27/05/2019	Dana Desa Tahap I		196.048.200					769.293.600
3	28/05/2019	Penarikan Dana Desa				194.350.500			574.934.100
4	28/05/2019	Penarikan Alokasi Dana Desa Tunai				348.413.000			226.530.100

Sumber: Buku Bank Desa Kuala Panduk

Berdasarkan Tabel 4.2 Buku Bank Desa yang digunakan Desa Kuala Panduk telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

c. Buku Kas Pembantu Pajak

Untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak maka akan dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak. Berikut ini merupakan beberapa contoh transaksi yang dilakukan oleh Desa Kuala Panduk.

- 28 Mei 2019 Desa Kuala Panduk membeli tengki, dap air, semen, besi beton, kawat ikat, dll Sebesar Rp 618.091. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp 618.091 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 92.714
- 28 Mei 2019 Desa Kuala Panduk membeli semen, wiremesh, paku, plastik cor, dll Sebesar Rp 9.144.727. Transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp 9.144.727 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 1.371.709
- 28 Mei 2019 Desa Kuala Panduk membeli kayu skor dan papan mall sebesar Rp 109.091. Transaksi ini dikenakan PPN Sebesar Rp 109.091 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp 16.364

Tabel 4.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Kuala Panduk
Tahun Anggaran 2019

N o	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyeto ran (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/05/2019	00017/KWT/09.2002/2019 Belanja Tengki, Dap Air, Semen, Besi Beton, Kawat Ikat, Dll.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	618.091		618.091
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.714		710.805
2	28/05/2019	00020/KWT/09.2002/2019 Belanja Semen, Wiremesh, Paku, Plastik Cor, Dll.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	9.144.727		9.144.727
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.371.709		10.516.436
3	28/05/2019	00076/KWT/01.2010/2019 Belanja Kayu Skor dan Papan Mall.			

	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091		109.091
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	16.364		125.455

Sumber: Buku Bank Kas Pembantu Pajak Desa Kuala Panduk

Berdasarkan Tabel 4.3 Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan Desa Kuala Panduk telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Desa Kuala Panduk Membuat Buku Kas Pembantu Kegiatan untuk melengkapi pencatatan agar lebih rinci dan juga jelas sesuai bidang dan kegiatan yang diselenggarakan desa. Dibawah ini merupakan beberapa contoh Buku Kas Pembantu Kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Kuala Panduk.

Tabel 4.4
Buku Kas Pembantu Kegiatan
Desa Kuala Panduk
Tahun Anggaran 2019

Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian		Penerimaan Dari Kas (Rp)	Pengeluaran		Penyelesaian Kas Desa (Rp)	Saldo Kas (Rp)
						Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/07/2019	0023/SPP/09.2002/2019	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades Bulan Juni s/d Juli 2019		8.000.0000				8.000.000
2	08/10	0041/SPP	Pembayaran Siltap		12.000.0000				20.000.000

	/2019	/09.2020/ 2019	dan Tunjangan Kades Bulan Sept s/d Oktober 2019				
3	10/12 /2019	0068/SPP /09.2020/ 2019	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades Bulan November s/d Desember 2019	8.000.000			28.000.000
4	28/05 /2019	0005/KW T/09.202 0/2019	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades Bulan Januari s/d Mei 2019		15.000.000		13.000.000

Sumber: *Buku Bank Kas Pembantu Kegiatan Desa Kuala Panduk*

Berdasarkan Tabel V.4 Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa yang digunakan Desa Kuala Panduk telah sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar. Semua transaksi yang terjadi, baik yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan, pengeluaran pembiayaan akan dicatat pada Buku Kas Umum. Dalam hal ini Desa Kuala Panduk belum membuat buku besar sesuai dengan pedoman yang ada didalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Berikut ini adalah contoh buku besar yang seharusnya dibuat oleh Desa Kuala Panduk.

Tabel 4.5
Buku Besar

Nama Akun : Kas di Bendahara Desa

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredi t (Rp)
27/05/2019	Penerimaan Transfer Alokasi Dana		573.245.400		573.245.400	

	Desa					
28/05/2019	Pembayaran Insentif RT/RW			30.000.000	543.245.400	
28/05/2019	Pembayaran Tunjangan Kedudukan BPD			15.500.000	527.745.400	
08/10/2019	Operasional BPD			10.000.000	517.745.400	
08/10/2019	Operasional PAUD			3.000.000	514.745.400	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel 4.6
Buku Besar

Nama Akun : Alokasi Dana Desa

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
27/05/2019	Penarikan Alokasi Dana Desa			573.245.400		573.245.400

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel 4.7
Buku Besar

Nama Akun : Dana Desa

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
27/05/2019	Dana Desa		196.048.200		196.048.200	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel 4.8
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Pegawai

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
28/05/2019	Pembayaran Insentif RT/RW		30.000.000		30.000.000	
28/05/2019	Pembayaran Tunjangan Kedudukan BPD		15.500.000		15.500.000	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Tabel 4.7
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Barang dan Jasa

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
08/10/2019	Operasional BPD		10.000.000		10.000.000	
08/10/2019	Operasional PAUD		3.000.000		3.000.000	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

3. Tahap Pengikhtisaran

Apabila seluruh transaksi telah diposting kedalam Buku Besar. Tahap selanjutnya dilakukan ialah pembuatan Neraca Saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk menyakinkan bahwa proses pencatatannya telah dilakukan dengan benar. Dengan dibuatnya neraca saldo maka akan memudahkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes dan laporan kekayaan milik desa

Dalam hal ini Desa Kuala Panduk belum membuat neraca saldo sesuai dengan pedoman yang ada didalam Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Dibawah ini merupakan contoh neraca saldo yang seharusnya dibuat oleh Desa Kuala Panduk.

Tabel 4.8
Neraca Saldo

Kode Akun	Nama Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1110	Kas Desa		
1111	a. Rekening Kas Desa	17.249.983	
1112	b. Kas di Bendahara Desa	92.129.655	
1120	Investasi		
1121	a. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa		
1130	Piutang		
1131	a. Piutang Sewa tanah		
1132	b. Piutang Sewa Gedung		

1141	Persediaan		
1142	a. Benda Pos dan Martai		
1143	b. Alat Tulis Kantor		
1300	Aset Tetap		
1310	a. Tanah		
1320	b. Peralatan dan Mesin	15.937.500	
1330	c. Gedung dan Bangunan		
1340	d. Jalan, Jaringan dan Instalasi		
1350	e. Aset Tetap Lainnya		
1360	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan		
1530	g. Aset Tak Berwujud h. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap		
1400	Dana Cadangan		
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya		
2100	Kewajiban Jangka Pendek		
2110	a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga		
2121	b. Hutang Pajak		88.166.655
2120	c. Hutang Bunga		
2130	d. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang		
2140	e. Pendapatan Diterima Dimuka		3.963.000
2150	f. Hutang Jangka Pendek Lainnya		
2200	Kewajiban Jangka Panjang		
4100	Pendapatan Asli Desa		
4200	Pendapatan Transfer		
4210	a. Dana Desa		980.241.000
4220	b. Alokasi Dana Desa		955.409.000
4241	c. Bantuan keuangan provinsi		200.000.000
4300	Pendapatan Lain-Lain		
	a. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		194.981.560
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :		
	a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan	566.898.000	
	b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	110.759.500	
	c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	5.000.000	
5200	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :		
	a. Sub Bidang Pendidikan	130.181.500	
	b. Sub Bidang Kesehatan	7.000.000	
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	869.115.500	
	d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.010.500	

5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :		
5310	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum	20.000.000	
	b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.000.000	
	c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	190.526.000	
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.700.000	
54000	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :		
	a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.957.250	
	b. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000	
6100	Penerimaan Pembiayaan		
6110	a. SILPA Tahun Sebelumnya		101.521.923
6200	Pengeluaran Pembiayaan		
6220	a. Penyertaan Modal Desa	292.000.000	

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

Setelah membuat Neraca Saldo, Desa Kuala Panduk dapat membuat Neraca Lajur, yang dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan atau penyajian Laporan Keuangan. Berikut bentuk Kertas Kerja atau Neraca Lajur yang dapat dibuat oleh Desa Kuala Panduk menurut Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Tabel 4.10
Neraca Lajur

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Saldo		Penyesuaian		Laporan Realisasi APBDesa		Laporan Kekayaan Milik Desa	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1110	Kas Desa :								
1111	a. Rekening Kas Desa	17.249.983						17.249.983	
1112	b. Kas di Bendahara Desa	92.129.655						92.129.655	
1120	Investasi :								
1121	a. Penyertaan Modal Pemerintahan Desa								

1130	Piutang :								
1131	a. Piutang Sewa Tanah								
1132	b. Piutang Sewa Gedung								
1141	Persediaan :								
1142	a. Benda Pos dan Matrai								
1143	b. Alat Tulis Kantor								
1300	Aset Tetap :								
1310	a. Tanah								
1320	b. Peralatan dan Mesin	15.937.500						15.937.500	
1330	c. Gedung dan Bangunan								
1340	d. Jalan, Jaringan dan Instalasi								
1350	e. Aset Tetap Lainnya								
1360	f. Konstruksi Dalam Pengerjaan								
1530	g. Aset Tak Berwujud								
	h. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap								
1400	Dana Cadangan								
1500	Aset Tidak Lancar Lainnya								
2100	Kewajiban Jangka Pendek :								
2110	a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga								
2121	b. Hutang Pajak		88.166.655					88.166.655	
2120	c. Hutang Bunga								
2130	d. Hutang Lancar Jangka Panjang								
	e. Pendapatan Diterima Dimuka		3.963.000					3.963.000	
2140									
2150	f. Hutang Jangka Pendek Lainnya								
2200	Kewajiban Jangka Panjang								
4100	Pendapatan Asli Desa								

4200	Pendapatan Transfer :								
4210	a. Dana Desa		980.241.000				980.241.000		
4220	b. Alokasi Dana Desa		955.409.000				955.409.000		
4241	c. Bantuan keuangan provinsi		200.000.000				200.000.000		
4300	Pendapatan Lain-Lain :								
	a. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		194.981.560				194.981.560		
5100	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :								
	a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan	566.898.000					566.898.000		
	b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	110.759.500					110.759.500		
	c. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	5.000.000					5.000.000		
5200	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :								
	a. Sub Bidang Pendidikan	130.181.500					130.181.500		
	b. Sub Bidang Kesehatan	7.000.000					7.000.000		
	c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	869.115.500					869.115.500		
	d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	77.010.500					77.010.500		
5300	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :					20.000.000			
5310	a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban	20.000.000				28.000.000			

	Umum	28.000.000						
	b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	190.526.000				190.526.000		
	c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.700.000				46.700.000		
	d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							
5400	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat :							
	a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.957.250				31.957.250		
	b. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000				3.000.000		
6100	Penerimaan Pembiayaan							
6110	a. SILPA Tahun Sebelumnya		101.521.923				101.521.923	
6200	Pengeluaran Pembiayaan							
6220	a. Penyertaan Modal Desa	292.000.000				292.000.000		

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini adalah tahap akhir dari siklus akuntansi. Pemerintahan Desa Kuala Panduk membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk mencatat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui sisa lebih (kurang) perhitungan anggaran diakhir periode. Selanjutnya desa Desa Kuala Panduk membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember tahun anggaran.

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini menyajikan Realisasi Pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa terdiri atas seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun pendapatan desa tersebut terdiri atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Belanja desa terdiri atas seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal desa.

Dibawah ini merupakan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dibuat oleh Desa Kuala Panduk.

Tabel 4.11
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Pemerintahan Desa Kuala Panduk
Tahun Anggaran 2019

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer	2.135.650.000	2.135.650.000	0
	Dana Desa	980.241.000	980.241.000	0
	Alokasi Dana Desa	955.241.000	955.241.000	0
	Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000	200.000.000	0
	Pendapatan Lain-lain	194.981.560	194.981.560	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.330.631.560	2.330.631.560	0
	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	682.692.233	682.657.500	34.733
	Bidang Pembangunan Desa	1.121.247.500	1.111.532.500	9.715.000
	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	297.726.000	290.226.000	7.500.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.487.750	38.487.500	250
	JUMLAH BELANJA	2.140.153.483		17.249.983
	SURPLUS/DEFISIT	190.478.077	207.728.060	-17.249.983
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	101.521.923	101.521.923	0
	Pengeluaran Pembiayaan	292.000.000	292.000.000	0
	Pembiayaan Neto	-190.478.077	-190.478.077	0
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	17.249.983	-17.249.983

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Kuala Panduk

Berdasarkan Tabel 4.11 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dibuat sekretaris Desa Kuala Panduk telah sesuai dengan Prinsip akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan Aset, Kewajiban dan Ekuitas, dimana aset terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dipenuhi oleh desa seperti hutang. Kewajiban dalam hal ini meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Adapun

ekuitas berisi ekuitas dan ekuitas SAL. Laporan Kekayaan Milik Desa harus dilakukan secara sistematis dan tentunya akuntabel yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas perhitungannya sesuai dengan format standar akuntansi.

Kaur Keuangan Desa Kuala Panduk telah menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan IAI KASP 2015, namun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1. Penyesuaian Aset Tetap

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 terdapat aset tetap sebesar Rp 2.823.198.900 yaitu berupa tanah Rp 0, peralatan dan mesin sebesar Rp 343.150.000, gedung dan bangunan Rp 951.006.900, jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp 1.529.042.000 dan aset tetap lainnya sebesar Rp 0. Ditahun 2019 belanja modal dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa senilai Rp 1.352.393.000 yaitu berupa belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat sebesar Rp 60.937.500, belanja irigasi/embung/drainase sebesar Rp 116.427.500, belanja modal jalan/prasarana jalan sebesar Rp 628.054.500, belanja modal jembatan sebesar Rp 91.722.000, belanja modal gedung, bangunan dan taman sebesar Rp 455.251.500. Seharusnya Desa Kuala Panduk melakukan penambahan pada aset tetap untuk Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 Desa Kuala Panduk seharusnya menyajikan aset tetap ialah sebesar Rp 4.175.591.900 yang berasal dari penjumlahan aset tetap yang ada di Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018 sebesar Rp 2.823.198.900 ditambah Belanja Modal yang ada di dalam Laporan Realisasi

Pelaksanaan Anggaran APBDesa tahun 2019 sebesar Rp 1.352.393.000.

Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2019 penyertaan modal bersaldo Rp 0, padahal dilihat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2019 terdapat pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal sebesar Rp 292.000.000, seharusnya desa Kuala Panduk Menyajikannya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Dibawah ini merupakan Laporan Kekayaan Milik Desa yang seharusnya dibuat oleh Desa Kuala Panduk:

Tabel 4.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintahan Desa Kuala Panduk
Sampai dengan 31 Desember 2019

KODE	URAIAN	TAHUN 2019
	2	3
	ASET	
	Aset Lancar	
	Kas dan Bank	109.379.638
	Kas di Bendahara Desa	92.129.655
	Rekening Kas Desa	17.249.983
	Piutang	
	Persediaan	
	Alat Tulis dan Benda Pos	100.000
	Jumlah Aset Lancar	109.379.638
	Investasi	
	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	292.000.000
	Jumlah Investasi	292.000.000
	Aset Tetap	
	Tanah	0
	Peralatan dan Mesin	15.937.500
	Gedung dan Bangunan	0
	Jalan, irigasi dan jaringan	0
	Aset Tetap Lainnya	0
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0
	Aset Tak Berwujud	0
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0
	Jumlah Aset Tetap	15.937.500
	Dana Cadangan	
	Jumlah Dana Cadangan	0
	Aset Tidak Lancar Lainnya	0

	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0
	JUMLAH ASET	125.317.318
	KEWAJIBAN	
	Kewajiban Jangka Pendek	
	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0
	Hutang Bunga	0
	Hutang Pajak	88.166.655
	Pendapatan Diterima Dimuka	3.963.000
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0
	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0
	Jumlah Kewajiban jangka Pendek	92.129.655
	JUMLAH KEWAJIBAN	92.129.655
	EKUITAS	
	Ekuitas	
	Ekuitas	15.937.500
	Ekuitas SAL	17.249.983
	Jumlah ekuitas	33.187.483
	JUMLAH EKUITAS	33.187.483
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	125.317.138

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2020

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang ada dalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan dan beberapa saran yang bermanfaat.

5.1 Kesimpulan

- a. Sistem Pencatatan yang digunakan Desa Kuala Panduk adalah *single Entry*. Dimana transaksi yang memengaruhi akun kas, jika bertambah akan masuk pada sisi penerimaan dan jika berkurang akan masuk pada sisi pengeluaran.
- b. Dasar Pencatatan yang digunakan Desa Kuala Panduk adalah Basis kas (*Cash Basis*). Dimana transaksi baru akan dicatat apabila menimbulkan perubahan pada kas, baik itu pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat apabila kas sudah diterima ataupun sudah dikeluarkan.
- c. Proses akuntansi Desa Kuala Panduk dalam pencatatan penggolongan desa belum memposting kedalam buku besar serta tidak melakukan pengikhtisaran dari buku besar ke neraca saldo dan kertas kerja.
- d. Dalam laporan Kekayaan Milik Desa Kuala Panduk jumlah aset yang diperoleh tahun 2018 tidak dilaporkan pada Laporan Kekayaan Miliki Desa tahun 2019
- e. Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Kuala Panduk belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

5.2 Saran

- a. Sebaiknya Desa Kuala Panduk menggunakan sistem pencatatan *Double Entry*. Dimana transaksi dicatat pada sisi debit dan kredit sehingga setiap pencatatan menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
- b. Sebaiknya Desa Kuala Panduk menggunakan Basis Akrual (*Accrual Basis*). Dimana transaksi dicatat dan diakui pada saat terjadi atau tanggal terjadinya tanpa memerhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
- c. Sebaiknya Desa Kuala Panduk dalam pencatatan penggolongan keuangan desa berpedoman pada Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
- d. Sebaiknya Desa Kuala Panduk pada Laporan Kekayaan Milik Desa melaporkan jumlah aset yang diperoleh tahun sebelumnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun sekarang.
- e. Sebaiknya Desa Kuala Panduk dalam pembuatan laporan keuangan berpedoman pada Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintah Desa*. Jakarta: Nusa Media.
- Warren, Carl S, dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2017. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martani, Dwi, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers
- T. Harrison, Jr Walter, dkk. 2011. *Akuntansi Keuangan-Edisi IFRS*, Edisi Kedelapan, Jilid 2. Jakarta: Erlangga.
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1&2*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Dasar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rudianto. 2010. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Erlangga
- Sasongko, Catur. 2016. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat
- Wijaya, David. 2018. *AkuntansiDesa*, Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau